

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1. Pemberdayaan Masyarakat

##### a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang berarti "kekuatan". Istilah ini terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*empowerment*" yang mempunyai arti Memberdayakan kelompok yang rentan atau kurang berdaya berarti memberikan mereka kekuatan atau kemampuan untuk hidup secara mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.<sup>18</sup>

Sumodiningrat berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses mewujudkan masyarakat mandiri dengan memanfaatkan semua potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan masyarakat melibatkan dua kelompok yang berhubungan satu sama lain yaitu masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan dan pihak yang melakukan pemberdayaan.<sup>19</sup>

Alfitri mengutip Robert Chambers bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial. Konsep ini menunjukkan suatu paradigma pembangunan baru yang berpusat pada manusia (*people-centered*), partisipatif (*participatory*), memberdayakan (*empowering*), dan berkelanjutan (*sustainable*). Konsep ini tidak sekedar mencegah kemiskinan tetapi juga

---

<sup>18</sup> Hamid, H.. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. (Makassar: De La Macca, 2018)

<sup>19</sup> Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2000)

dikembangkan lagi untuk digunakan sebagai pengganti konsep pertumbuhan yang telah digunakan sebelumnya.<sup>20</sup>

Allah SWT memerintahkan hamba-Nya agar semangat dalam mencapai kemandirian dan mengasah kemampuan secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT untuk memerintahkan hamba-Nya agar mandiri yang terdapat dalam QS. An-Najm ayat 39 sebagai berikut :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya : “*bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.*” (QS. An-Najm: 53:39)<sup>21</sup>

Manusia dianjurkan untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang sebanding dengan usaha yang mereka lakukan. Hal ini sesuai dengan makna yang terdapat di dalam ayat tersebut. Dengan pemberdayaan manusia diajarkan untuk bekerja secara mandiri. Namun untuk mencapai kemandirian tersebut diperlukan upaya melalui tahapan pemberdayaan yang tepat agar dapat memperoleh hasil yang terbaik.

#### **b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Mardikanto dan Poerwoko mengemukakan tujuan pemberdayaan yang mencakup berbagai usaha perbaikan yang melibatkan beberapa hal sebagai berikut :<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Alfitri, *Community Development, Teori dan Aplikasi*. ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro) hal 199.

<sup>22</sup> Mardikanto T dan Poerwoko S, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2012)

1) Perbaikan Kelembagaan (*Better Institution*)

Perbaikan ini dipusatkan pada pembangunan hubungan jaringan kemitraan bisnis. Kelembagaan yang baik dapat mendorong individu untuk berpartisipasi dalam kelembagaan agar fungsinya dapat terlaksana dengan baik.

2) Perbaikan Usaha (*Better Business*)

Perbaikan ini akan meningkatkan kinerja bisnis dengan memberikan kepuasan kepada semua anggota organisasi dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

3) Perbaikan Pendapatan (*Better Income*)

Perbaikan pendapatan sangat dipengaruhi oleh bisnis yang baik. Dengan meningkatnya pendapatan dapat bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga.

4) Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*)

Banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh aktivitas manusia, yang sering kali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, pemberdayaan diharapkan mampu memperbaiki kondisi lingkungan.

5) Perbaikan Kehidupan (*Better Living*)

Berbagai faktor mampu mempengaruhi tingkat kehidupan manusia, salah satunya adalah tingkat penghasilan atau daya beli setiap keluarga. Meningkatnya penghasilan dapat membuat keadaan lingkungan semakin baik. Sehingga mampu mensejahterakan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

### **c. Acuan Pemberdayaan**

Untuk mengetahui tujuan pemberdayaan secara praktis, maka diperlukan acuan sebagai tolak ukur dalam menilai seseorang dapat dianggap sebagai berdaya atau tidak. Pemberdayaan dapat dikatakan berdaya apabila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) Berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- 2) Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
- 3) Mampu menghadapi tantangan dan ancaman dari luar.
- 4) Mampu melakukan inovasi sebagai cara untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara.<sup>23</sup>

### **d. Tahap – Tahap Pemberdayaan**

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang panjang serta membutuhkan banyak waktu dan energi untuk membangun kesadaran masyarakat. Dalam proses pemberdayaan terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### **1) Tahap Pembentukan Perilaku dan Penyadaran**

Tahap ini merupakan tahap perencanaan dan proses pemberdayaan masyarakat. Dimulai dengan membangun kesadaran diri dan peduli untuk meningkatkan kapasitas diri.

#### **2) Transformasi Kemampuan Berupa Wawasan Pengetahuan**

Pada tahap ini masyarakat bertindak sebagai pengikut dalam objek pembangunan, sehingga pemberdaya harus mengetahui semua

---

<sup>23</sup> Nur Mahmudi Isma'il, *Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul dalam Hotmatua Dauly dan Mulyanto (ed), Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat* (Bandung: ISTECS, 2001), 28

<sup>24</sup> Evita Bahar, *Pemberdayaan Ekonomi Desa dengan Koperasi* (Sleman: New Vita Pustaka, 2021), 19-20

keterampilan dan keahlian agar masyarakat dapat mengambil peran dalam pembangunan.

### 3) Peningkatan Kemampuan Intelektual

Individu dan kelompok yang sudah diberikan pemberdayaan secara tidak langsung dapat meningkatkan kemampuan guna menumbuhkan kreatifitas dan inovasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga tahap ketiga ini sangat penting untuk dilakukan.

#### e. Pemberdayaan dalam Pandangan Islam

Pemberdayaan masyarakat dalam Islam bukanlah konsep yang baru. Hal ini telah diterapkan oleh Rasulullah SAW di masa lampau ketika beliau mendorong para pengikutnya untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan.<sup>25</sup>

Pemberdayaan masyarakat jika dilihat dari perspektif ajaran Islam merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Selain mengajarkan tentang ketaatan kepada Tuhan, Islam juga mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap sesama. Dengan kata lain, prinsip-prinsip kemanusiaan yang terdapat dalam ajaran Islam diimplementasikan dalam kehidupan bersosial. Pemberdayaan dianggap sebagai tanda pembangunan yang tak pernah berhenti. Dengan mendorong perubahan, individu dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.<sup>26</sup> Prinsip perubahan dalam islam terkandung pada Q.S Ar-Ra'd (13): 11

---

<sup>25</sup> Masykur Hakim dan Tanu Widjaya, Model Masyarkat Madani (Jakarta: Intimedia Cipta Grafika, 2003), h. 16-18.

<sup>26</sup> Drajat Tri Kartono, dkk, *Administrasi Pelayanan Publik antara Paradoks dan Harapan Masa Depan* (Surakarta: Pustaka Cakra, 2004)

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : Baginya (manusia) terdapat (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergantian dari depan dan belakangnya yang menjaga atas perintah Allah SWT. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Sayyid Qutb berpendapat dalam ayat ini bahwa manusia harus melakukan perubahan. Karena Allah SWT tidak akan mengubah kenikmatan, bencana, status, dan kemuliaan baginya kecuali mereka sendiri yang ingin mengubahnya dalam kehidupan.<sup>27</sup>

Terdapat beberapa petunjuk dalam Islam terkait dengan Pemanfaatan sumber daya diantaranya sebagai berikut:

- 1) Al-Quran dan Sunnah telah memberikan petunjuk kepada manusia bahwa alam diciptakan untuk dimanfaatkan sebagai ladang untuk mencari rezeki.
- 2) Manusia merupakan wakil Allah SWT yang diberi tanggung jawab untuk mengurus, memanfaatkan, dan mengembangkan sumber daya alam di bumi ini. Namun, Allah SWT tetap menjadi pemilik sejati dari semua sumber daya alam tersebut.
- 3) Islam memperbolehkan dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi maupun umum dengan menggunakan sumber daya alam.
- 4) Sebaiknya manusia patuh pada peraturan sesuai dengan ketetapan Allah SWT untuk menjaga, merawat, dan meningkatkan sumber daya

<sup>27</sup> Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zilalil Qur'an, terj. As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Jilid 2, h. 38.

alam daripada menyebabkan kerusakan yang dapat mengakibatkan hilangnya keunikan dan keindahan alam.<sup>28</sup>

## **2. Program Pekarangan Pangan Lestari ( P2L )**

### **a. Pengertian Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L)**

Pekarangan Pangan Lestari (P2L) menurut Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian merupakan "kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama dengan mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan serta pendapatan". Program P2L ini digunakan untuk menangani daerah yang merupakan prioritas utama untuk menangani intervensi stunting dan daerah rentan terhadap pangan atau mempertahankan daerah yang tahan pangan.<sup>29</sup>

Kegiatan P2L dilakukan dengan mengalihfungsikan lahan yang tidak produktif, terbengkalai, atau terlantar menjadi area produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Fokus utama dari program P2L terletak pada pemasaran hasilnya. Pelaksana program P2L adalah kelompok wanita atau ibu-ibu yang terlibat dalam kegiatan pertanian. Mereka tumbuh dan berkembang karena memiliki kepentingan bersama dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk meningkatkan produktivitas usaha tani mereka.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad, Abdullah. "Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al Quran." *PILAR* 13.1 (2022): 67-87.

<sup>29</sup> Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. 2019. *Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) tahun 2020*. 4

<sup>30</sup> Baroleh J, Olfie B, Mamesah M.M. 2017. Administrasi Kelompok Wanita Tani (Kwt) Di Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon. *Jurnal Agri-Sosial Ekonomi Unsrat* 13 (3): 203-204.

## **B. Pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L)**

Kegiatan P2L menurut Badan Ketahanan Pangan terbagi menjadi tiga tahap sebagai berikut: <sup>31</sup>

### **1) Kegiatan Tahap Penumbuhan**

Kegiatan tahap penumbuhan di alokasikan untuk kabupaten / kota sesuai dengan keputusan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai prioritas daerah rentan ketahanan pangan. Alokasi dana pada kegiatan tahap penumbuhan terbagi menjadi tiga zonasi yaitu zona 1, zona 2 dan zona 3.

(a) Zonasi 1 meliputi Provinsi di Pulau Jawa, Sumatera Selatan, Lampung dan Bali. Zonasi 1 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 50.000.000,-

(b) Zonasi 2 meliputi Provinsi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat. Zonasi 2 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 60.000.000,-

(c) Sedangkan Zonasi 3 meliputi Provinsi Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat. Pada zonasi ini mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 75.000.000,-.

Pembagian zonasi tersebut didasarkan pada perbedaan harga sesuai wilayah. Perbedaan harga ini termasuk biaya barang fasilitas guna menunjang pembangunan seperti kebun bibit, harga benih, biaya operasional dan bahan pendukung lainnya. Kegiatan pada tahap ini meliputi pengelolaan kebun bibit, penanaman, pasca panen hingga pemasaran. Tim Teknis Kabupaten / Kota memberikan dukungan dan

---

<sup>31</sup> Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. 2019. *Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) tahun 2020*. 10-14

pelatihan administrasi kepada setiap kelompok penerima manfaat kegiatan P2L dalam hal budidaya tanaman, pengelolaan dana, pengemasan produk tanaman, pemasaran produk hingga pelaporan.

## 2) Kegiatan Tahap Pengembangan

Tahap Pengembangan bertujuan untuk memperkuat fungsi dan kemampuan pengembangan ternak (unggas), pertanian, dan pengelolaan lahan pekarangan sebagai dukungan bagi aktivitas penyediaan, pemanfaatan, dan pemasaran pangan oleh kelompok P2L. Pemerintah memberikan alokasi dana bantuan untuk kegiatan P2L baik tahap penumbuhan maupun tahap pengembangan sebesar Rp 15.000.000.-

## 3) Kegiatan Tahap Pembinaan

Tahap ini dilakukan oleh Dinas atau Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pangan provinsi. Pemerintah pusat melakukan pemantauan dan monitoring terhadap P2L guna memastikan kegiatan berjalan dengan lancar.

Kegiatan P2L memberikan manfaat baik untuk individu maupun masyarakat antara lain Keanekaragaman hayati terjaga, kesejahteraan pekerja diperhatikan, usaha pertanian menguntungkan, dan konsumen mendapat jaminan kualitas produk. Setelah panen di pekarangan, hasilnya dapat dimakan oleh masyarakat atau dibeli di pasar. Maka, hasil panen tersebut tidak hanya memperbaiki kondisi ekonomi

keluarga, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan komunitas sekitarnya.<sup>32</sup>

### **3. Ketahanan Pangan**

#### **a. Pengertian Ketahanan Pangan**

Jaswandi mengutip Maxwell dan Frankenberger bahwa ketahanan pangan sebagai kondisi dimana semua orang memiliki akses secara fisik, sosial, dan ekonomi untuk memperoleh pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan pilihan pangan demi kehidupan yang aktif dan sehat.<sup>33</sup>

Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Pangan (UU No. 7 Tahun 1996) mendefinisikan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau. Sementara menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO) atau Organisasi Pertanian dan Pangan PBB mendefinisikan ketahanan pangan sebagai sebuah kondisi dimana semua masyarakat bisa memperoleh pangan yang aman dan bergizi untuk dapat hidup secara sehat dan aktif.<sup>34</sup>

Nindyowati menjelaskan bahwa secara garis besar terdapat empat aspek pokok ketahanan pangan yaitu ketersediaan, aksesibilitas, keamanan, dan waktu. Keempat aspek ini saling berkaitan satu sama lain guna membentuk sistem ketahanan pangan yang kokoh. Apabila salah satu aspek

---

<sup>32</sup> Faza Amalia Khusna. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sebagai Sumber Gizi Keluarga. JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial – ISSN: 2746-5160 (e) Vol. 4, no. 1 (Maret 2022)

<sup>33</sup> Jaswandi. Memantapkan Kepemimpinan Nasional Di Daerah Guna Mendukung Ketahanan Pangan Dalam Rangka Kemandirian Bangsa. (Jakarta : Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2012) 22

<sup>34</sup> Dr. Kristiawan, S.P., M.M. 2021. *Ketahanan Pangan*. (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2021) 3-5

tidak terpenuhi maka akan terjadi ketimpangan dan menimbulkan rapuhnya ketahanan pangan masyarakat.<sup>35</sup>

#### **b. Tujuan Ketahanan Pangan**

Tujuan ketahanan pangan bagi Indonesia akan lebih mudah tercapai jika didasarkan pada beberapa faktor, di antaranya:

1. Penyediaan pangan yang memanfaatkan ketersediaan sumber daya lokal, termasuk sumber daya alam, manusia, teknologi, dan sosial.
2. Efisiensi ekonomi dengan tetap mempertimbangkan keunggulan kompetitif di setiap wilayah.
3. Distribusi yang mengikuti mekanisme pasar yang kompetitif.
4. Peningkatan kualitas dan keragaman konsumsi pangan.<sup>36</sup>

#### **c. Acuan Ketahanan Pangan**

Webb dan Rongers mengemukakan bahwa terdapat beberapa acuan ketahanan pangan sebagai berikut :

##### **1. Ketersediaan Pangan yang cukup**

Ketersediaan pangan adalah situasi di mana individu dapat memperoleh makanan dalam jumlah yang memadai, aman, bergizi, dan sehat. Makanan ini dapat berasal dari produksi domestik, impor, atau bantuan pangan. Sehingga kebutuhan konsumsi masyarakat dapat tercukupi.

##### **2. Aksesibilitas Pangan (*food availability*)**

Akses pangan mencakup kemampuan setiap individu atau rumah tangga, dengan sumber daya yang dimilikinya untuk mendapatkan

---

<sup>35</sup> Nindyowati. 2001. *Ketahanan Pangan*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka 2001) hal 7

<sup>36</sup> Hanafie, Rita. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010). Hlm 270

makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi. Makanan ini dapat diperoleh dari produksi pribadi, pembelian, atau bantuan pangan. Ada beberapa bentuk akses yang dimiliki oleh rumah tangga atau individu dalam hal pangan, yaitu:

a) Akses ekonomi.

Merujuk pada kemampuan individu atau rumah tangga untuk membeli makanan yang cukup dan bergizi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan, harga makanan, ketersediaan lapangan kerja, dan daya beli.

b) Akses fisik.

Mengacu pada kemampuan individu atau rumah tangga untuk memperoleh makanan yang cukup melalui infrastruktur dan jaringan distribusi yang ada.

c) Akses sosial.

Akses ini dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, kebiasaan, dan ketersediaan pangan.<sup>37</sup>

### 3. Stabilitas Ketersediaan Pangan

Stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga dinilai berdasarkan seberapa cukup ketersediaan pangan dan seberapa sering anggota rumah tangga makan dalam sehari. Salah satu cara untuk menjaga ketersediaan pangan dalam jangka panjang adalah dengan mengurangi frekuensi makan dan mencampur bahan makanan pokok, seperti beras dan ubi kayu.

---

<sup>37</sup> Webb, Patrick dan Rongers, Beatrice. 2003. *Addressing the in food insecurity. Occasional Paper. No.1, USAID office of food for peace.*

#### 4. Kualitas (keamanan pangan)

Kualitas dan keamanan pangan dinilai menggunakan indeks ketahanan pangan, yang dihitung dengan menggabungkan empat indikator ketahanan pangan: ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan, keberlanjutan, dan kualitas/keamanan pangan. Indikator stabilitas ketersediaan pangan diperoleh dari kombinasi antara kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan. Sementara itu, indikator ketersediaan pangan dihasilkan dari gabungan antara stabilitas ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan. Indeks ketahanan pangan diukur berdasarkan penggabungan indikator kontinuitas ketersediaan pangan dengan kualitas/keamanan pangan.<sup>38</sup>

#### **d. Ketahanan Pangan Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai suatu bidang ilmu yang bersifat multidimensi dan interdisipliner, yang mencakup pengetahuan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, serta ilmu rasional yang merupakan hasil pemikiran dan pengalaman manusia. Dengan memanfaatkan ilmu ini, manusia dapat mengatasi tantangan keterbatasan sumber daya untuk mencapai kebahagiaan atau *falah*.<sup>39</sup>

Secara etimologis, kata "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani "*oikonomika*," yang terdiri dari dua kata: "*oikos*" yang berarti rumah, dan "*nomos*" yang berarti aturan atau hukum. Secara umum, kata ini diartikan sebagai aturan atau manajemen rumah tangga. Dengan demikian, ekonomi

---

<sup>38</sup> Sianipar, Dkk, "Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani Di Kabupaten Monokwari", Jurnal Istilah Ekonomi Pertanian, Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta, 8,2 (Februari 2012)

<sup>39</sup> Andi Buchari, Islamic Economic: Ekonomi Bukan Opsi, Tetapi Solusi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 91.

adalah aturan-aturan yang digunakan untuk mengatur kebutuhan hidup manusia dalam lingkup rumah tangga. Dalam konteks ini, rumah tangga mencakup rumah tangga individu (keluarga), badan usaha atau perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan sebagainya.<sup>40</sup>

Perilaku ekonomi muslim tidak hanya berfokus pada kepuasan pribadi, tetapi lebih mengutamakan peran sebagai khalifah di bumi yang diatur sesuai syariat. Tujuan akhir dari ekonomi ini adalah tercapainya kesejahteraan dalam upaya meraih kebahagiaan sejati atau mencapai *falah*. *Falah* berasal dari bahasa Arab yang berarti “kesuksesan” atau “kemenangan”. Dalam Konteks Islam *falah* digunakan untuk merujuk pada kebahagiaan dan keberhasilan yang tidak bersifat duniawi namun juga bersifat spiritual dan menyeimbangkan akhirat.

Konsep ini mencakup keberhasilan dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama, termasuk aspek moral, spiritual, dan perilaku yang baik. Seorang muslim memiliki tujuan hidup untuk mewujudkan masalah (kebaikan dan kesejahteraan) dan mencapai *falah*, yang diartikan sebagai kesejahteraan, kemuliaan, kesuksesan, dan kemenangan. *Falah* menjadi tujuan akhir dari perilaku ekonomi Muslim, baik dalam aspek duniawi maupun akhirat, serta mencakup aspek material dan spiritual.<sup>41</sup>

Imam Al Ghazali mengemukakan kesejahteraan berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni agama, jiwa, akal, keluarga atau

---

<sup>40</sup> Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*. (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), 13

<sup>41</sup> Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 14

keturunan, harta atau kekayaan. Lima tujuan dasar tersebut dijabarkan menjadi beberapa tingkatan, antara lain :

1. *Maslahah Dharuriyat*, mengacu pada upaya menjaga kebaikan dalam hal agama dan dunia. Artinya, jika kebutuhan dasar ini hilang, maka kebaikan dalam kehidupan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang yang akan menyebabkan kerusakan dan bahkan kehancuran kehidupan. *Dharuriyat* mencerminkan kebutuhan dasar atau primer yang harus selalu dipenuhi dalam kehidupan manusia.
2. *Maslahah Hajiyyah*, merupakan hal-hal yang diperlukan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menimbulkan bahaya dan ancaman adalah memastikan bahwa sesuatu yang seharusnya ada tidak menjadi tidak ada. *Hajiyyah* juga diartikan sebagai kondisi di mana jika suatu kebutuhan terpenuhi, maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas hidup manusia.
3. *Maslahah Tahsiniyat*, yaitu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang dipahami oleh akal sehat. *Tahsiniyat* juga dapat diidentifikasi sebagai kebutuhan tersier atau kebutuhan yang mendekati kemewahan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> M Soleh Mauludin dan Ayu Wulandari Putri Pratama, "Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh di Baitul Maal Hidayatulla dalam Mensejahterakan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19" 2021. Hal 13